



Ibarat Duri di Telapak Kaki: “Gerakan Hijrah” dan Kekerasan bagi Kaum Perempuan

Trie Yunita Sari¹, Lies Marcoes²

¹ UIN Syarif Hidayatullah

Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

² Yayasan Rumah Kita Bersama

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

¹ trie.yunita@uinjkt.ac.id, ² liesmarcoes17@gmail.com

Abstrak:

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul suatu gelombang gerakan keislaman kontemporer yang mengusung dakwah berhijrah. Gerakan hijrah ini tumbuh subur seiring kecanggihan media sosial dalam mengamplifikasi konten dakwah dengan gaya pop culture. Para sarjana ilmu sosial menilai fenomena ini tidak lepas dari kondisi global yang terjadi di banyak tempat seperti komodifikasi agama, kebangkitan konservatisme, hingga neo-radikalisme. Sorotan terhadap kondisi dan ketegangan isu-isu makro sebagai konteks yang melatarbelakangi gerakan hijrah melupakan pembahasan mengenai praktik kekerasan yang secara nyata berlangsung dan mengancam keamanan perempuan. Dengan menggunakan pendekatan analisis gender, penulis mengelaborasi berbagai ancaman kekerasan terhadap perempuan termuat dalam berbagai konten dakwah oleh salah satu gerakan hijrah yang memiliki puluhan ribu anggota, yaitu gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan analisis konten sejak tahun April 2018 hingga Mei 2020. Sebagai penutup, penulis memberikan rekomendasi bagaimana peran otoritas keagamaan termasuk ulama perempuan dalam merespons fenomena kekerasan gender mengusung tema hijrah.

Kata kunci: Gerakan Hijrah, Kekerasan Berbasis Gender, Anti-Pacaran, Pendekatan Analisis Gender

Abstract:

In recent years, plenty of scholarly works have denoted the raise of Islamic hijrah movements in Indonesia. These hijrah movements emerge massively using the advance of social media that facilitate the amplification of their da'wa content through popular culture trends. Few scholars have seen this phenomenon as tangled with the global context that happens in many countries e.g., religious commodification, conservative turn, and neo-radicalism. The sole focus on macro issues as the context behind the emergence of the hijrah movement implies the lack of attention to the human security threat that might be found in their activism. By using a gender analysis approach, I analyzed dozens of da'wa content by a hijrah movement named Indonesia without Dating, which is fraught with violent practices against women. The data in this study is obtained from April 2018 to May 2020 through field research, interview, and content analysis. This article also provides recommendations to the religious authorities including female clerics in responding to the threat against women using the hijrah campaign.

Keywords: Hijrah Movement, Gender-Based Violence, Anti-Dating, Gender Analysis Approach

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, geliat keislaman di Indonesia diwarnai oleh fenomena “gerakan hijrah”. Gerakan hijrah ini subur bertumbuh seiring kecanggihan media sosial dalam mengamplifikasi konten dakwah dengan gaya *pop culture*. Para sarjana ilmu sosial menilai fenomena ini tidak lepas dari kondisi global yang terjadi di banyak tempat seperti komodifikasi agama, kebangkitan konservatisme, hingga neo- radikalisme (Fealy dan White, 2008; Ahnaf, 2013; van Bruinessen, 2013; Hadiz, 2014, 2016; Zulhazmi, 2018, Ardhiyanto, 2018, PPIM UIN, 2021).¹

Secara umum fenomena ini ditandai dengan kemunculan aktor-aktor, komunitas atau “gerakan” yang mempopulerkan narasi hijrah yang pada umumnya dimediasi oleh kecanggihan media sosial. Hijrah pada konteks ini dimaknai secara normatif yaitu sebagai perpindahan atau transformasi gaya hidup dari kehidupan masa lalu yang dianggap penuh dosa ke kehidupan yang lebih baik dengan menerapkan syariat Islam berdasarkan al-Qur’an dan hadis.²

Ciri gerakan hijrah dapat dikenali setidaknya dengan dua cara. Pertama dari penggunaan istilah hijrah pada nama gerakan. Beberapa contoh di antaranya adalah *Pemuda Hijrah, Anak Muda Hijrah, Yuk Hijrah, Berani Berhijrah* dan lain sebagainya. Ada juga yang tidak menyematkan istilah hijrah namun secara khusus konten dakwahnya mengusung gagasan hijrah di antaranya adalah *Yuk Ngaji, Indonesia Tanpa Pacaran, dan Kajian Musyawarah*.

Dilihat dari konten dan bagaimana dakwah berhijrah disampaikan, gerakan hijrah secara spesifik menasar kaum muda Muslim Indonesia. Bukan hal yang mengherankan jika generasi muda menjadi sasaran gerakan hijrah, sebab banyak aktor keagamaan menilai bahwa kaum muda Muslim adalah modal penting bagi keberlangsungan agama Islam.³ Meski secara umum menargetkan kaum muda, gerakan hijrah banyak menarik perempuan sebagai audiens utama. Dapat dilihat dari pola pengemasan dakwah-dakwah keagamaan yang intens ditujukan untuk perempuan.⁴

Sorotan terhadap kondisi dan ketegangan isu-isu makro sebagai konteks yang melatarbelakangi gerakan hijrah seperti fragmentasi otoritas keagamaan dan geliat

¹ Greg Fealy and Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Institute of Southeast Asian Studies, 2008); Mohammad Iqbal Ahnaf, “Struktur Politik Dan Deradikalisasi Dendidikan Agama Bagi Anak Muda Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 153–171; Martin Van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013); Vedi R Hadiz, *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East* (Cambridge University Press, 2016); Abraham Zakky Zulhazmi and Dewi Ayu Sri Hastuti, “Da’wa, Muslim Millennials, and Social Media,” *Lentera* 11, no. 2 (2018): 121–138; Imam Ardhiyanto, “Contemporary Islamic Movement, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The#IndonesiaTanpaJIL Movement,” *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, no. 95 (2018): 151–171.

² Yuyun Sunesti, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca, “Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–198; Quinton Temby, “Shariah, Dakwah, and Rock’n’Roll: Pemuda Hijrah in Bandung” (2018).

³ Linda Herrera and Asef Bayat, eds., *Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North* (New York: Oxford University Press, 2010).

⁴ Trie Yunita Sari, “Hijrah and Islamic Movement in Cyberspace: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran” (2019).

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Islam konservatisme (Ardhianto, 2018; PPIM UIN, 2021) kerap melupakan pembahasan mengenai implikasi dari kemunculan gerakan-gerakan hijrah yang memiliki pola dakwah kesalehan yang superfisial dan banyak menysasar kaum perempuan. Atas kekosongan perhatian terhadap hal tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan gender untuk melihat praktik-praktik kekerasan yang secara nyata berpotensi mengancam keamanan insani khususnya keamanan perempuan. Dari sekian gerakan hijrah yang masif diikuti perempuan muda, penulis mempersempit perhatiannya kepada salah satu gerakan hijrah bernama gerakan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP). Gerakan ITP didirikan 7 September 2015 oleh La Ode Munafar, seorang penulis buku bertemakan Islam dan pemuda. Ia juga diketahui berafiliasi dengan *Hizbut Tahrir Indonesia*.⁵ Gerakan ITP mengarusutamakan ajakan berhijrah dengan meninggalkan praktik pacaran dan beralih melakukan taaruf (proses perkenalan melalui perantara) sebagai proses menuju jenjang pernikahan. Hingga saat ini gerakan ITP mengklaim telah memiliki jaringan di lebih 80 titik di Indonesia dan puluhan ribu *member*. Jasa yang ditawarkan pun tidak hanya dakwah melalui media *online* tetapi juga Pendidikan pranikah hingga program taaruf *online*.

Gerakan ITP menaruh perhatian lebih kepada perempuan sebab gerakan ini meyakini visinya sebagai perisai yang melindungi dan memuliakan perempuan sebagaimana perintah dalam Islam. Bagi gerakan ini, perempuan dianggap pihak yang paling dirugikan dari praktik pacaran sebab selain menjerumuskannya ke dalam perbuatan zina, perempuan rentan menjadi korban pemerkosaan, pelaku aborsi, dan korban pembunuhan. Alasan ini yang melandasi mengapa dalam banyak konten dakwah, mereka mengemas berbagai berita kekerasan yang dialami perempuan aktivis pacaran. Namun, alih-alih bersimpati atas perempuan yang kerap menjadi korban dalam relasi pacaran, gerakan ini secara kontras menginferioritaskan perempuan melalui berbagai narasi keagamaan yang bias pandangan misoginis. Sehingga berimplikasi menempatkan perempuan sebagai *objek* yang diberangus haknya, perlu ditata ulang, dan disingkirkan dari ruang publik (didomestikasi).

Konstruksi Narasi Perempuan menurut Islam: Pemuliaan yang Melemahkan

Konstruksi narasi mengenai jati diri perempuan oleh gerakan ITP mudah ditemukan dalam buku-buku tulisan La Ode Munafar, postingan di media sosial, maupun ceramah-ceramah yang dibawakan oleh para pengisi kajian Indonesia Tanpa Pacaran di ruang-ruang nyata dan luar jaringan. Beberapa di antaranya akan dipaparkan di bagian selanjutnya.

Dalam buku Calon Umi Shalehah, La Ode membingkai narasi bagaimana seharusnya perempuan harus beruntung dilahirkan sebagai perempuan sebab Allah Swt. menganugerahkan banyak potensi yang tidak dimiliki oleh kaum adam.⁶ Potensi tersebut di antaranya adalah naluri keibuan, karakter lemah lembut/penyayang, pandai bicara, sabar, dan dianugerahi fungsi biologis untuk mengandung, melahirkan serta menyusui. Ia meyakinkan bahwa apabila potensi tersebut dipergunakan dengan berpegang pada al-Qur'an dan Hadis, maka potensi-potensi itu dapat digunakan untuk meraih surga Allah Swt.

⁵ Ibid.

⁶ La Ode Munafar and Dwi Suci Apriani, *Calon Umi Shalehah* (Gaul Fresh, 2016). *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Konsepsi mengenai potensi perempuan versi La Ode Munafar menunjukkan stereotip pandangan gender biner yakni pandangan yang mengklaim bahwa hanya ada dua gender yaitu feminin dan maskulin. Menurut gerakan ITP, secara kodrati dan universal semua perempuan dianggap membawa sifat feminin yang lemah lembut dan penyayang. Sehingga dalam agama Islam, perempuan memiliki peran untuk merawat anak-anak dan suami. Mengingat sifat natural perempuan yang tidak akan tega menelantarkan anak dan suka menghibur suami.⁷ Penjelasan ini sejalan dengan pembagian peran budaya patriarki yang membebaskan perempuan untuk mendidik anak dan mengurus rumah tangga. Implikasi dari stereotip ini, perempuan dianggap tidak cocok berada di domain publik karena berorientasi pada perasaan/emosional, sulit untuk berkonsentrasi dan membuat keputusan yang rasional atau tegas tanpa intervensi rasa belas kasih.

Pandangan dualitas konsep gender ini juga melegitimasi sifat bawaan laki-laki yang maskulin, mendominasi, dan agresif. Sebabnya, dalam relasi seksual, perempuan akan selalu menjadi obyek pemuas hasrat seksual laki-laki. Sehingga, tidak mengherankan dalam berbagai postingan media sosial, dampak terkait pacaran selalu mengekspos kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Meski demikian, dalam persoalan ini seksualitas perempuan yang justru harus dikendalikan melalui berbagai upaya seperti menutup aurat, tidak keluar malam, membatasi keberadaan di ruang publik dan lain sebagainya agar tidak memancing hasrat seksual laki-laki.

Mengontrol Seksualitas Perempuan melalui Diskursus Keperawanan

Kontrol atas seksualitas perempuan dimanifestasikan salah satunya melalui diskursus keperawanan. Gerakan ini kerap menyebarkan konten berisi analogi keperawanan perempuan layaknya harta berharga yang harus dijaga dan hanya boleh diserahkan kepada pasangan sah (suami) kelak. Sehingga jika seorang perempuan kehilangan keperawanan, mereka dianggap kotor, tidak berharga, dan kehilangan masa depannya. Bahkan La Ode Munafar kerap secara vulgar menyebut seorang perempuan yang hamil di luar nikah lebih hina derajatnya daripada pelacur. Retorika tersebut disampaikan dalam berbagai postingan media sosial, buku *Berani Nikah Takut Pacaran* dan ceramah di masjid-mesjid salah satunya pada kegiatan temu nasional akbar di Bekasi (15/04/2018) yang dihadiri oleh ribuan massa.

La Ode menyatakan dalam buku *Berani Nikah Takut Pacaran*:⁸

... apakah perempuan ini (perempuan yang hamil di luar pernikahan) masih punya masa depan ketika kehormatannya telah hilang?, bagaimana ia menutupi perutnya yang akan semakin membesar?, bagaimana menutupi aib dari keluarga dan lingkungan sosialnya?, mungkinkah ada pria baik yang mau menikahi wanita kotor seperti perempuan ini? jika, memilih menggugurkan kandungannya, apakah ia tidak lebih jahat daripada seekor binatang?, atau sekalian saja jadi pelacur? Ya Allah, makin hina engkau Diana!

⁷ Ibid.

⁸ La Ode Munafar, *Berani Nikah Takut Pacaran* (Gaul Fresh, n.d.).

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pandangan misoginis gerakan ITP juga banyak termuat dalam konten yang mengisahkan perempuan sebagai korban kekerasan. Dalam *buku Berani Nikah Takut Pacaran*, La Ode mengisahkan seorang teman SMA-nya yang dengan tipu muslihatnya pernah berhubungan seksual dengan lebih dari 20 orang perempuan. Sang laki-laki menceritakan bahwa ia dengan mudah berzina dengan banyak perempuan, tidak lain karena perempuan dapat dengan mudah tertipu siasat laki-laki. Perempuan dianggap lemah akan rayuan laki-laki sehingga tanpa sadar mengundang laki-laki tersebut. “jika sedang tidak ada orang tua di rumahnya perempuan ini justru yang mengundang teman saya untuk main ke rumahnya, sampai memberikan ongkos/uang bensin untuk datang, hingga membiayai biaya kencan”, ujar La Ode.

Berdasarkan dua cerita di atas yang meski tidak dapat divalidasi kebenarannya dapat disimpulkan bahwa dakwah La Ode Munafar mengenai dampak buruk seks di luar pernikahan kental dengan pandangan misoginis yang mengobjektifikasi perempuan sebagai makhluk seksual yang tanpa kendali. Penggunaan diksi *aib*, *kotor*, *kehilangan masa depan*, dan *tidak lebih baik daripada binatang* dilekatkan pada sosok perempuan yang kehilangan keperawanannya. Sekalipun bingkai narasi memosisikan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Perempuan sebagai korban tetap diposisikan menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap membuka peluang terjadinya perzinahan. Objektifikasi perempuan dalam ideologi gender ITP juga dapat ditemukan dalam narasi bahwa perempuan kelak dituntut menjadi penghiburan (pemuas) hasrat lelaki ketika sudah menikah. Artinya, gerakan ini berpandangan bahwa sekalipun keperawanan atau genital melekat pada tubuh perempuan, otoritas terhadapnya bukan miliknya pribadi melainkan laki-laki.

Jilbabisasi dan “Blurisasi” yang Penuh Kekerasan Simbolik

Konstruksi citra tubuh perempuan juga dapat ditemui pada berbagai unggahan yang mewajibkan para perempuan untuk menutup aurat. Aurat secara harfiah bermakna bagian tubuh yang harus ditutup. Sebagian ulama sepakat bahwa aurat perempuan mencakup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun yang menarik, meski wajah bukan termasuk aurat, gerakan ITP kerap menormalisasi *blurisasi* atau pemburaman pada wajah perempuan ketika memasang foto di media sosial. Tidak lain alasannya karena dengan menampilkan wajah atau berswafoto (*selfie*) di media sosial, para perempuan memiliki motivasi untuk dipuji dan membanggakan diri atas parasnya. Perbuatan ini dianggap dosa jariah apalagi jika banyak mata laki-laki yang bukan mahram melihat foto itu.⁹

Bagi kelompok fundamentalis, baik jilbabisasi maupun blurisasi wajah kerap disandarkan pada alasan teologis bahwa tubuh perempuan adalah sumber fitnah (*itqa al-fitn*). Sebagian besar umat Islam mengasosiasikan pemakaian jilbab sebagai bentuk ketaatan perempuan terhadap perintah agama, selain kerap dihubungkan dengan perilaku moral.¹⁰ Sejalan dengan interpretasi ini, gerakan ITP juga

⁹ Contoh pelanggaran menampilkan wajah atau berfoto *selfie* di media sosial ditemukan pada unggahan Facebook https://web.facebook.com/pg/CalonUmiShalehah/posts/?ref=page_internal. Diakses pada 27 Maret 2020, pukul 17.41.

¹⁰ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

meyakini bahwa jilbabisasi dan blurisasi wajah perempuan adalah perintah agama yang juga memiliki fungsi sosial untuk memproteksi perempuan dari perbuatan zina maupun mengundang hasrat laki-laki untuk melecehkannya.

Dalam pelbagai teks media sosial, gerakan ITP meyakinkan pengikutnya bahwa perintah menutup aurat adalah perintah langsung dari Allah Swt. seperti yang tertuang pada QS. al- Nur: 31. Gerakan ITP menegaskan bahwa perintah berjilbab dianggap final bahkan disejajarkan dengan perintah wajib seperti salat dan berpuasa. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ustazah Herawati Sambodo dalam sebuah kajian yang diinisiasi oleh ITP Akhwat Jakarta Timur (01/03/2020). Ia menyampaikan di depan puluhan remaja putri yang datang bahwa jika perempuan tidak menutup auratnya, maka dosa akibat mengumbar aurat akan ditanggung oleh orang tua laki-laki jika belum menikah atau saudara laki-laki jika bapaknya telah meninggal dunia. Pernyataan ini secara tidak langsung mendukung sikap otoritatif yang harus dilakukan bapak atau saudara laki-laki ketika mendapati anak atau saudara perempuannya yang tidak menutup aurat dengan berjilbab.

Selain mewajibkan penggunaan jilbab untuk menutup aurat, gerakan ini pun membakukan bentuk jilbab yang diklaim berdasarkan ajaran Islam yang sesungguhnya (*syar' i*). Syarat jilbab syar' i menurut gerakan ITP adalah tidak boleh bercorak, tidak berwarna mencolok dan berpotongan seperti jubah yang longgar bahkan dianjurkan memakai penutup wajah atau cadar. Model jilbab demikianlah yang dianggap sesuai ajaran Islam karena tidak menarik perhatian dan melambangkan kesederhanaan. Dalam rangka mempopulerkan jenis jilbab seperti ini, ITP membuat akun khusus untuk menjual jilbab syar' i yaitu @Gaulfreshcloth dan @Gaulfreshhijab.



Contoh Jilbabisasi dan Blurisasi pada Akun @GaulFresh (Sumber: Instagram @GaulFresh)

Pandangan teologis ITP mengenai persoalan jilbab menunjukkan simplifikasi tafsir ayat-ayat yang secara umum menganjurkan kaum perempuan untuk menggunakan *khimar*. Padahal dalam tradisi Islam persoalan jilbab masih dapat diperdebatkan khususnya mengenai hukum dan bentuknya. Pendasaran teologis terhadap QS. An- Nur ayat 31 pun mengabaikan konteks sejarah turunnya anjuran ini, yang sesungguhnya ayat sebelumnya juga memerintahkan kaum laki-laki untuk

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

menjaga pandangan dan menundukkan hawa nafsunya. Berdasarkan pengalaman penulis mengobservasi gerakan ITP, penjelasan konteks historis semacam ini tidak pernah disampaikan baik melalui media sosial maupun ceramah-ceramah di dunia nyata. Konstruksi aurat dan pakaian syar'i menurut gerakan ITP terkesan *rigid* dan tidak bisa dinegosiasi. Padahal terdapat *ikhtilaf* (perbedaan) dalam kajian hukum Islam mengenai hal ini, salah satunya dari Syekh Muhammad al-Ghazali yang berpandangan bahwa Islam tidak memiliki ajaran khusus mengenai model pakaian yang selama ini dipahami sebagai pakaian syar'i. Islam memberikan kebebasan pada pemeluknya untuk berbusana selama tetap memegang dua prinsip yakni tidak boros dan jauh dari kesombongan.¹¹

Pelaziman jilbab syar'i dan pemburaman wajah perempuan merupakan bentuk kekerasan simbolik terhadap tubuh perempuan. Sebab konstruksi ini diinfiltrasi dalam rangka menghilangkan representasi perempuan di muka publik. Jilbabisasi dan blurisasi wajah perempuan bukan merupakan bentuk pemuliaan, justru melahirkan diskriminasi bahwa kerusakan sosial terjadi karena perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Selain itu, pelaziman ini juga berisiko mengancam perempuan-perempuan Muslim yang tidak tunduk terhadap konstruksi tersebut. Ada kemungkinan besar mereka mengalami eksklusi sosial atau pemaksaan untuk mengikuti tren yang ada, seperti diberi stigma *belum dapat hidayah, perempuan nakal, patut dilecehkan* dan sebagainya.

Sebagai kesimpulan bagian ini, dapat dilihat bahwa dakwah-dakwah ITP mengenai pentingnya keperawanan dan menutup aurat yang disebarluaskan melalui buku, media sosial dan ruang-ruang nyata menunjukkan intoleransi terhadap hak kebertubuhan perempuan dan hak atas ruang publik. Dengan menggunakan dalil-dalil agama yang sesungguhnya masih dapat diperdebatkan keabsahannya, gerakan ini menanamkan kesadaran bahwa tubuh perempuan dianggap amoral dan sumber fitnah sehingga harus ditutupi atau tidak semestinya tampak di ruang publik. Konsekuensi dari konstruksi citra tubuh yang sarat dengan pandangan misoginis ini pun niscaya membuat relasi perempuan tercerabut dari tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan terus menjadi tubuh sosial yang rentan mendapat stigma dari pihak luar jika tidak sesuai standar budaya patriarki.

Domestifikasi Perempuan melalui Narasi *al Ummu wa Rabbatul Bait*

Upaya ITP dalam mendomestifikasi perempuan juga dapat ditemukan pada praktik diskursif yang menyebarkan ajaran tentang kodrat perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga (*al ummu wa rabbatul bait*). Berangkat dari stereotip gender yang dilekatkan kepada perempuan, sebagaimana yang telah disinggung di bagian sebelumnya, gerakan ini meyakinkan para remaja putri untuk menjemput takdir sebagai seorang umi shalehah (ibu yang sesuai ajaran Islam). Konstruksi narasi umi shalehah merupakan strategi ITP untuk membentuk keluarga-keluarga yang tunduk terhadap syariat Islam dengan menekankan pada ketaatan perempuan. Doktrin ini diinfiltrasi di berbagai media demi mewujudkan pranata masyarakat Islami yang ideal (dalam kerangka *khilafah Islamiyah*). Pada bagian ini saya akan memperlihatkan unsur-unsur patriarkis dalam narasi *al ummu wa rabbatul bait* yang dibentuk oleh ITP dan konsekuensinya terhadap perempuan.

¹¹ Ibid., 88.

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Secara khas, konten dakwah mengenai umi shalehah berfokus pada fungsi reproduksi dan peran perempuan. Dalam berbagai unggahan di media sosial maupun dakwah yang disampaikan di mimbar-mimbar masjid, saya menemukan konten persuasif yang membawa ide utama bahwa potensi-potensi natural perempuan berdasarkan biologis dan psikologis adalah tanda bahwa semua perempuan ditakdirkan menjadi umi shalehah. Gerakan ini percaya bahwa tubuh perempuan dirancang untuk mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengurus rumah tangga. Ibarat “sebuah pabrik” yang siap memproduksi barang, perempuan dengan tuntunan dipersiapkan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai fitrahnya sebagai perempuan.

Istilah *al ummu wa rabbatul bait* yang digunakan ITP untuk merujuk identitas kodrati perempuan kerap dikaitkan dengan fungsi reproduksi perempuan. Artinya untuk menjadi seorang umi, seorang perempuan tidak hanya diharuskan menikah tapi juga menghasilkan keturunan. Istilah pabrik yang digunakan ITP untuk perumpamaan fungsi reproduksi perempuan, berimplikasi pada pandangan mengenai kesuburan perempuan. Di berbagai postingan Facebook *#IndonesiaTanpaPacaran*, kesuburan perempuan dianggap variabel penting dalam menentukan layak tidaknya seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dengan menyitir HR. Abu Dawud, ITP mencoba meyakinkan para pria muslim untuk menikahi perempuan-perempuan yang penyayang dan subur sebagai cara memperbanyak umat nabi Muhammad saw.¹² Gerakan ITP percaya bahwa ada ajaran dalam Islam untuk memperbanyak anak sebagai bekal untuk membangun peradaban, oleh karenanya penting bagi para lelaki untuk memiliki *lahan garapan* yang memiliki kemampuan generatif yang baik. Dogma ini juga menjadi landasan di balik pandangan ITP menolak pemakaian alat kontrasepsi yang tujuannya membatasi kelahiran.

Narasi-narasi tentang potensi perempuan yang secara alamiah didesain membubunikan anak, memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab jika sebuah pernikahan belum dikaruniai anak. Dalam berbagai kasus kdrt, stigma tidak subur atau mandul acap kali hanya disandangkan kepada perempuan. Padahal secara medis dijelaskan bahwa keberhasilan generatif bergantung pada instrumen dari organ-organ seksual laki-laki dan perempuan, keduanya saling melengkapi.¹³ Keyakinan kuat terhadap hadis misoginis bahwa perempuan adalah tanah garapan ditambah legitimasi dari negara seperti dalam UU pernikahan No.1 tahun 1974 pasal 4 dan 5, perempuan berpotensi besar menjadi korban praktik poligami non konsensual.

Selain menanamkan pemahaman tentang fungsi reproduksi, narasi al ummu wa rabbatul bait erat berkelindan dengan konsep peran gender perempuan. Untuk

¹² Lihat unggahan Facebook pada akun Indonesia Tanpa Pacaran, 5 April 2018 <https://web.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID/photos/p.2126890164211165/2126890164211165/?type=1&theater>,

14 Juli 2018

<https://web.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID/photos/p.2192203334346514/2192203334346514/?type=1&theater>,

21 Januari 2019

<https://web.facebook.com/IndonesiaTanpaPacaranID/photos/p.2330694617164051/2330694617164051/?type=1>,

¹³ Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan Dalam Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017), 187.

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

memahami konsep peran gender versi ITP, penulis dalam proses pengumpulan data mengikuti kajian keputrian/ khusus *akhwat* yang diinisiasi oleh ITP cabang. Hasil dari proses pengumpulan data, penulis menemukan bahwa untuk menjadi seorang istri dan ibu shalehah menurut gerakan ITP, perempuan harus melakukan persiapan yang meliputi mental, fisik dan materil. Persiapan-persiapan ini bertujuan agar perempuan mampu mengemban perannya sebagai umi shalehah.

Persiapan mental pertama yang dilakukan adalah persiapan untuk menyambut jodoh yang datang untuk meminang. Dalam berbagai kesempatan, La Ode Munafar menyatakan bahwa waktu datangnya jodoh (pasangan) tidak dapat diprediksi. Artinya, bisa saja datang cepat atau lambat, jikalau datang cepat semestinya tidak dihindari. Cepat atau lambat tidak dapat diukur dengan patokan usia, sebab dalam Islam tidak ada batas usia tertentu untuk menikah, satu-satunya prasyarat adalah akil balig (sudah mencapai tahap kedewasaan). Secara biologis, akil balig dapat ditandai oleh menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.¹⁴ Persiapan mental kedua diperlukan untuk meningkatkan kualitas ibadah, seperti menjalankan ibadah wajib tepat waktu dan juga ibadah-ibadah sunnah. Tujuannya agar setelah menikah, perempuan tidak merasa terpaksa jika suami ingin melihat istrinya rajin beribadah atau mengajak beribadah bersama-sama.

Di luar persiapan mental ada persiapan fisik dan materil. Persiapan fisik meliputi usaha-usaha untuk membahagiakan suami dengan menguasai berbagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dan menghibur suami (bersolek, memanjakan, dan menghasilkan keturunan). Terakhir adalah persiapan materil. Persiapan materil tidak berarti perempuan dituntut untuk menghasilkan uang, melainkan perempuan diharuskan detail dan amanah dalam mengatur keuangan rumah tangga.¹⁵

Penjelasan mengenai persiapan-persiapan menjadi umi shalehah secara eksplisit menjelaskan tugas-tugas yang harus diemban perempuan ketika menjadi istri dan ibu. Jika dicermati, konsep pembagian peran yang dibangun ITP menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki dalam urusan rumah tangga. Sebab, semua tugas-tugas yang harus dilakukan perempuan berorientasi pada kepuasan laki-laki. Pertama, ajaran untuk mempersiapkan mental menjadi seorang istri di usia berapapun, menunjukkan bahwa nasib seorang perempuan ditentukan oleh orang lain yang akan menjadi pasangannya. Pandangan ini mengabaikan realita bahwa perempuan juga memiliki hak untuk merancang hidupnya, mau menjadi apa di masa depan, dan kelak akan menikahi siapa. Dogma semacam ini juga dapat memicu adanya pernikahan di bawah umur yang bertentangan dengan hukum negara dan beresiko mengancam kesehatan reproduksi perempuan.

Kedua, ajaran untuk menjadi taat dengan melakukan berbagai macam ibadah agar dapat mengikuti ritme ritus suami memperlihatkan bahwa ada semacam tangga hierarkis menuju Tuhan. Intimasi perempuan sebagai hamba Tuhan bergantung pada siapa suami yang kelak akan mengimami. Artinya, perempuan dididik untuk mematuhi laki-laki bahkan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Ketiga, ajaran untuk

¹⁴ Pernyataan ini diperoleh dari wawancara penulis dengan La Ode Munafar (25/09/2018), berbagai postingan di Facebook dan di kanal youtube dengan judul *Wawancara BBC Inggris pada Penggagas #IndonesiaTanpaPacaran La Ode Munafar*.

¹⁵ Munafar and Apriani, *Calon Umi Shalehah*, 59–76.

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

mampu melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga dari *dapur*, *sumur*, hingga *kasur* menunjukkan bahwa tidak adanya konsep kemitraan dalam mengurus rumah tangga. Pembagian peran gender yang ketat juga menunjukkan deviasi konsepsi pernikahan dalam Al-Qur'an yang tidak didasarkan pada perbudakan, tetapi pada belas kasih dan kerja sama. Khaled Abou El Fadl dalam *Speaking in God's Name* juga mengkritisi cara pandang Muslim yang meyakini bahwa suami sebagai *qawwāmūn* (secara harfiah kerap diterjemahkan sebagai pemimpin).¹⁶ Konsekuensinya, ketaatan/ kebajikan yang dilakukan istri harus berorientasi kepada kesenangan suami. Ia menggugat yurisprudensi Islam yang demikian sebab istilah *qawwāmūn* dalam Al-Qur'an dipergunakan dalam berbagai konteks yang membuat kata ini dapat diterjemahkan sebagai pelindung, penjaga bahkan pelayan. Selain itu, sama sekali tidak ada dalam Al Quran penggunaan kata *ṭā'ah* (ketaatan) dalam menggambarkan hubungan perkawinan. Sebaliknya, konsepsi pernikahan dalam Al-Qur'an ditandai sebagai hubungan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan hubungan antara yang superior dan inferior.

Dari semua pemaknaan narasi *al ummu wa rabbatul bait* di atas yang terkesan mengharuskan perempuan untuk berada di ruang domestik saja, saya menemukan adanya ambivalensi pada pandangan figur-figur perempuan dalam pergerakan ITP. Dalam kajian keputrian ITP yang pernah saya ikuti secara intensif di Yogyakarta (mulai bulan Januari – Maret 2019), Ustadzah Bunga Erlita Rosalia menyebutkan bahwa ajaran Islam tidak pernah membenarkan untuk mengkerangkeng perempuan di dalam rumah, meski ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya tempat bagi perempuan adalah di rumah. Pandangan demikian juga diutarakan oleh Ustadzah Herawati Sambodo dalam kajian ITP akhwat di Jakarta Timur (01/03/2020).

Keduanya mendorong remaja putri untuk aktif mencari ilmu di luar rumah sebagai bekal untuk mengemban perannya di ranah publik. Mereka pun membantah jika perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi. Bagi mereka, seorang perempuan justru harus berilmu dan berpendidikan tinggi agar menjadi partner yang dapat menyeimbangi suami, selain untuk menjawab tuntutan jaman. Pada awalnya, saya sempat terkecoh bahwa pandangan tokoh-tokoh ini menjadi representasi perempuan yang mendobrak struktur hierarkis dalam kelompok fundamentalis. Dengan berada di ruang publik, mereka menunjukkan agensi untuk memengaruhi audiens dengan pandangan mereka, memiliki karir di luar rumah, serta mendapatkan penghasilan sendiri. Namun ternyata cara pandang mereka mengenai peran publik perempuan juga dilandasi motivasi untuk mendomestifikasi perempuan.

Dorongan untuk mengajarkan remaja putri untuk aktif di luar rumah tidak menyiratkan bahwa mereka punya persetujuan terhadap pandangan feminisme yang mendukung kesetaraan dan otonomi perempuan. Sebaliknya, keduanya tegas menolak feminisme yang dianggap telah membuat para perempuan menyimpang dari kodratnya. Bagi mereka, keberadaan perempuan di ruang publik harus diniatkan sebagai upaya mencari ilmu khususnya ilmu agama dan mengemban tugas dakwah. Melalui berbagai pelatihan seperti *public speaking*, menulis, membuat konten visual, dan wirausaha, para audiens perempuan ini dilatih menjadi

¹⁶ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (London: Oneworld Publications, 2014), 428–429.

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

agen-agen kelompok fundamentalis yang menarik perempuan lain untuk kembali ke rumah sesuai kodratnya sebagai ibu dan manajer rumah tangga. Kajian-kajian *akhwat* yang saya datangi menunjukkan pola umum bahwa kelonggaran bisa berkarir di luar rumah, merupakan upaya ITP untuk menyadarkan para Muslimah dari distorsi feminisme dan kapitalisme. Ideologi ini dianggap membuat perempuan lupa akan urusan rumah tangga dan berorientasi pada kesuksesan material. Meski mengakui ada feminisme yang toleran terhadap pilihan perempuan untuk tinggal di rumah, ITP meyakini bahwa virus yang dibawa feminisme ini akan membuat perempuan tidak peduli urusan umat Islam di luar rumah alias menjadikan perempuan sebagai pribadi individualis. Pemikiran inilah yang melandasi konsep peran publik menurut ITP.

Pembahasan pada bagian ini telah memperlihatkan bahwa penyebaran dan pengulangan narasi *al ummu wa rabbatul bait* oleh ITP jelas membatasi ruang fisik perempuan dengan pembebanan tugas-tugas domestik dan tugas generatif kepada perempuan. Sekalipun ada kelonggaran untuk mengakses ilmu pengetahuan, perempuan diharapkan menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pengasuhan anak. Dorongan ITP kepada para perempuan untuk berfokus pada pembekalan ilmu agama juga berdampak pada limitasi akses ilmu pengetahuan yang bersifat duniawi. Selain itu, gelar manajer rumah tangga memperlihatkan pembatasan pilihan kiprah berkarir di luar rumah, yang lebih jauh menimbulkan konsekuensi tercerabutnya hak ekonomi perempuan karena hanya mengandalkan laki-laki sebagai sumber penghidupan utama. Terakhir dapat disimpulkan bahwa konsepsi mengenai peran domestik perempuan yang dianggap sebagai takdir berpotensi pada stigmatisasi sesama perempuan yang memiliki aspirasi untuk melakukan pengembangan diri.

Kesimpulan: Gerakan Hijrah dan Tantangan bagi Kesetaraan Gender

Sebenarnya dalam konteks Indonesia kontemporer, munculnya gerakan hijrah melengkapi gerakan-gerakan Islam lainnya yang menentang gagasan dan advokasi kesetaraan gender. Ideologi gender berdasarkan pemahaman tekstualis terhadap ajaran Islam serta penentangan terhadap aktivisme kesetaraan gender yang dianggap ajaran barat menjadi faktor yang melatarbelakangi suburnya gerakan Islam yang mengusung dakwah terkait perempuan sejati dan keluarga ideal menurut Islam.¹⁷ Dengan membesarkan dakwah terkait dekadensi moral, kesalehan, dan urgensi penegakan syariat demi terciptanya fondasi moral yang baik (*hisbah*), gerakan hijrah menginfiltrasi ideologi gender yang patriarki.

Hal yang mengancam dari gagasan dan “ideologi” Indonesia Tanpa Pacaran adalah bangunan gagasan tentang sebuah keluarga ideal yang meniscayakan akan seketika terjadi manakala relasi itu dilakukan tanpa menyalahi aturan agama. Relasi tanpa pacaran telah diidealkan sebagai sebuah jembatan untuk membangun keluarga harmonis yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Sementara permasalahan sesungguhnya dalam relasi berkeluarga, hubungan-hubungan timpang secara gender yang secara faktual sebagai penyebab kekerasan dalam keluarga, atau kejahatan-kejahatan seksual yang hanya bisa dikenali melalui relasi yang terbuka sama sekali diabaikan.

¹⁷ Afiffur Rochman Syahrani, “Muslim Women Resisting Feminism in Contemporary Indonesia: A Study of the Family Love Alliance” (Universitas Gadjah Mada, 2019).

Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 8 (2), 2022 DOI: 10.15408/ushuluna.v8i2.24318

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata bahwa keberadaan gerakan hijrah semacam ITP itu ibarat duri di telapak kaki, cukup mengganggu untuk berjalan tetapi terlalu sederhana untuk diperhatikan secara serius sebagai ancaman. Di tengah keterbatasan penelitian yang belum mencakup analisis terhadap gerakan hijrah lainnya, penulis menyarankan upaya kolektif yang terencana untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam merespons kekerasan berbasis gender yang disebabkan gagasan intoleran yang dibidani oleh ITP maupun gerakan serupa. Khususnya dengan melibatkan ulama perempuan sebagai bagian otoritas keislaman yang relevan dan berpengaruh di komunitas muslim. Untuk itu, ulama perempuan harus mampu memahami problem remaja/kaum muda dan konteks masyarakat urban yang menjadi ceruk besar gerakan hijrah semacam ITP.

Daftar Pustaka

- Abou El Fadl, Khaled. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. London: Oneworld Publications, 2014.
- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal. "Struktur Politik dan Deradikalisasi Pendidikan Agama bagi Anak Muda Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2013): 153–171.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 2017.
- Ardhianto, Imam. "Contemporary Islamic Movement, Popular Culture and Public Sphere in Indonesia: The #IndonesiaTanpaJIL Movement." *Archipel. Études interdisciplinaires sur le monde insulindien*, no. 95 (2018): 151–171.
- Fealy, Greg, and Sally White. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Hadiz, Vedi R. *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press, 2016.
- Herrera, Linda, and Asef Bayat, eds. *Being Young and Muslim: New Cultural Politics in The Global South and North*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Munafar, La Ode. *Berani Nikah Takut Pacaran*. Gaul Fresh, n.d.
- Munafar, La Ode, and Dwi Suci Apriani. *Calon Umi Shalehah*. Gaul Fresh, 2016.
- Sari, Trie Yunita. "Hijrah and Islamic Movement in Cyberspace: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement# IndonesiaTanpaPacaran" (2019).
- Sunesti, Yuyun, Noorhaidi Hasan, and Muhammad Najib Azca. "Young Salafi-Niqabi and Hijrah: Agency and Identity Negotiation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 8, no. 2 (2018): 173–198.
- Syahrani, Afiffur Rochman. "Muslim Women Resisting Feminism in Contemporary Indonesia: A Study of the Family Love Alliance." Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Temby, Quinton. "Shariah, Dakwah, and Rock'n'Roll: Pemuda Hijrah in Bandung" (2018).
- Van Bruinessen, Martin. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn."* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

Zulhazmi, Abraham Zakky, and Dewi Ayu Sri Hastuti. “Da’wa, Muslim Millennials, and Social Media.” *Lentera* 11, no. 2 (2018): 121–138.